

PELUNCURAN BUKU CEGAH STUNTING ITU PENTING

Ketua Umum Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN Lisa Erick Thohir (kedua kiri), Ketua Umum Forum Istri Anggota Holding BUMN Farmasi (FIADIFA) Ita Honesti Basyir (kedua kanan), Wakil Ketua Umum IIP BUMN Shinta Pahala Mansury (kiri) dan Irin Kartiko Wirjoatmodjo (kanan) berfoto bersama saat peluncuran buku berjudul Cegah Stunting Itu Penting karya FIADIFA di Jakarta, Rabu (3/8). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-132 tahun Bio Farma.



Sri Mulyani: APBN Merupakan Instrumen Penting Bangun Fondasi Digital

Pemerintah terus membangun infrastruktur digital di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) agar turut menjadi prioritas sehingga masyarakatnya bisa menikmati transformasi digital.

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dalam membangun fondasi transformasi digital di Indonesia. "Digitalisasi jelas memiliki manfaat yang sangat luas. APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk terus membangun fondasi transformasi digitalisasi ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi di Jakarta, Rabu (3/8).

Seperti dilansir dari Antara, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menurunkan anggaran seluruh kementerian/lembaga (K/L) selama masa pandemi, kecuali yang memiliki fungsi untuk membantu sektor kesehatan dan transformasi digital. Belanja transformasi digital selama pandemi Covid-19 tidak dipotong, namun justru ditingkatkan mengingat masyarakat

dipaksa mengadopsi teknologi digital dalam berkegiatan seiring tidak diperbolehkannya bertemu secara tatap muka.

Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah melihat perlunya sebuah fondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital. "Ini adalah keharusan yang tidak boleh ditunda dan dikorbankan hanya karena terjadi pandemi, dan justru kita harus akselerasi di dalam investasi," kata Sri Mulyani.

Ia menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan salah satu dari sedikit K/L yang anggarannya dalam tiga tahun terakhir terus meningkat.

Anggaran Kemkominfo pada 2020 Rp20 triliun naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5,3 triliun dan kemudian kembali naik pada 2021 menjadi Rp26 triliun serta Rp27 triliun tahun ini. Anggaran itu dipakai untuk

membangun fondasi infrastruktur karena tidak mungkin ada transformasi digital apabila infrastruktur digital tidak tersedia termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa.

Pemerintah pun terus membangun infrastruktur digital di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) agar turut menjadi prioritas sehingga masyarakatnya bisa menikmati transformasi digital.

Upaya transformasi digital ini juga sekaligus untuk mempersempit praktik yang tidak baik yaitu korupsi terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi dapat dikurangi dan dihapuskan antara lain dengan membangun platform digital," jelas Sri Mulyani.

Lebih jauh Sri Mulyani menyatakan digitalisasi akan mempersempit adanya peluang praktik korupsi di berbagai kegiatan termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

"Membangun platform digital akan mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik yaitu korupsi atau kompromi terhadap integritas," katanya.

Sri Mulyani menyebutkan salah satu upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) dan Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk kegiatan hulu minyak dan gas (migas).

Integrasi data dari Simbara dan SIT Migas dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia.

Ia mengatakan SIT Migas dan Simbara yang berhubungan dengan sistem informasi terintegrasi dari migas serta mineral dan batu bara (minerba) itu memberi banyak manfaat.

Manfaat tersebut antara lain menciptakan sebuah ekosistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan data yang konsisten secara nasional serta harmonisasi struktur neraca komoditas.

Simbara dan SIT Migas diharapkan menciptakan keseragaman persepsi atas data dan informasi sekaligus menjamin keselarasan dan ketelusuran data dari hulu ke hilir untuk komoditas sumber daya alam (SDA) migas dan minerba. • **dro**



BPR SUPRA

PULAUINTAN

General Contractor



PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA

Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Mitratel Akuisisi 6.000 Tower Milik Telkomsel

JAKARTA (IM) - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel kembali menambah jumlah kepemilikan menara telekomunikasi, dengan mengakuisisi 6.000 menara telekomunikasi milik PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko menjelaskan, dengan adanya penambahan tersebut, maka sampai dengan awal Agustus ini perseroan memiliki 34.800 menara telekomunikasi.

"Mitratel sekarang ini menjadi tower company terbesar secara kepemilikan jumlah tower di kawasan Asia Tenggara, kepemilikan kami menjadi 34.800," ujar Theodorus, di Jakarta.

Pria yang biasa disapa Teddy itu menyebutkan, penambahan jumlah tower menjadi modal kuat perusahaan untuk melakukan ekspansi dan mendukung

akselerasi implementasi jaringan 5G di Indonesia. Serta, menambah alat produksi anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk itu.

"Ini diharapkan memperkuat momentum kedua perusahaan dalam memastikan terciptanya pengelolaan aset dan perluasan lini bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan yang semakin ideal, produktif, efektif, efisien, dan relevan dengan setiap perkembangan teknologi," tuturnya.

Direktur Investasi Mitratel Hendra Purnama menambahkan, peningkatan jumlah tower akan menambah pendapatan perusahaan ke depan.

Lewat akuisisi 6.000 tower Telkomsel, Mitratel mendapatkan kontrak baru senilai Rp9,6 triliun dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. • **hen**

Labu Adhi Commuter Rp37,6 Miliar

JAKARTA (IM) - Emiten pengembang properti terintegrasi dengan transportasi massal PT Adhi Commuter Properti Tbk membukukan laba bersih Rp37,6 miliar pada semester I 2022, meningkat 10,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp33,9 miliar.

Laba bersih emiten berkode ADCP itu dikontribusikan dari pendapatan usaha yang naik 53 persen pada semester I 2022 menjadi Rp308 miliar dibanding periode yang sama 2021 sebesar Rp201 miliar.

"Di tengah dinamika perekonomian pasca-pandemi, ADCP mampu mencatatkan laba sebesar Rp37,6 miliar. Capaian ini tentu saja didukung dengan kinerja solid dalam percepatan penyelesaian proyek-proyek TOD untuk diserahkan menjelang momentum beroperasionalnya LRT secara

komersial," ujar Rizkan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/8).

Salah satu proyek yang telah diserahkan pada semester awal 2022 yaitu Adhi City Sentul dengan pengembangan kawasan seluas 120 hektare yang terintegrasi dengan transportasi massal.

Selain itu kontribusi lain berasal dari sumber pendapatan berulang atau recurring income ADCP yaitu Hotel GranDhika Indonesia sebesar 35 persen dari Rp31 miliar menjadi Rp42 miliar (yoy).

Seiring dengan peningkatan pendapatan, Rizkan menyebutkan raih laba sepanjang semester I didorong juga oleh kenaikan marketing sales sebesar 47 persen menjadi Rp634 miliar pada Juni 2022 dari periode yang sama 2021 sebesar Rp433 miliar.

Tiga proyek penopang pertumbuhan penjualan yakni Adhi City Sentul sebesar 17,23 persen, LRT

City Bekasi - Green Avenue 8,02 persen, dan LRT City Jatibening 8,02 persen.

Pada tahun ini anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk itu menargetkan penyelesaian proyek LRT City lainnya dan pengembangan komersial area di sepanjang koridor stasiun LRT guna menangkap peluang pasar dari operasional LRT yang dapat menjadikan kawasan Transit Oriented Development (TOD), bukan hanya sebagai penunjang transportasi massal melainkan juga sebagai sebuah destinasi baru bagi masyarakat.

"Saya optimistis perseroan siap menyambut momentum beroperasionalnya LRT dengan pengembangan kawasan yang sesuai dengan gaya hidup baru masyarakat perkotaan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat bertempat tinggal di hunian TOD," tandas Rizkan. • **pan**

Neraca Komoditas Dukung Transparansi Izin Ekspor Impor

JAKARTA (IM) - Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono menegaskan sistem database nasional Neraca Komoditas bertujuan untuk mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang ekspor dan impor.

"Kami sebagai pengeluar izin, ini (Neraca Komoditas) menjadi suatu dasar penerbitan. Menjadi acuan penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor dari kementerian lembaga pembina sektor komoditas," ujarnya dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PPNB, Rabu (3/8).

Seperti dilansir dari Antara, Veri dalam paparannya menyampaikan Neraca Komoditas menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional terkait ekspor dan impor. Neraca Komoditas bertu-

juan memberikan kemudahan dan kepastian berusaha dalam rangka meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang konsumsi bagi penduduk dan bahan baku dan atau bahan penolong untuk kepentingan industri.

Dalam melakukan transformasi kebijakan perdagangan luar negeri, Kemendag memperhatikan tiga poin penting dalam pengaturan yakni Neraca Komoditas, 100 online dan terintegrasi dan fiktif positif untuk perizinan berusaha.

"Hal tersebut mengarahkan ke transparansi, efektivitas, simplifikasi, kepatuhan dan kepastian yang meningkatkan daya saing," katanya.

Neraca Komoditas memiliki dasar hukum Pasal 559 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan menghasilkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)

yang dituangkan dalam Peraturan Presiden. Melalui dasar hukum tersebut, kementerian/lembaga menyediakan data terkait rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data pendukung pada sistem elektronik.

Oleh karenanya Veri berharap pelaku usaha yang memasukkan data yang valid dalam aplikasi digital SNANK agar Kemendag dapat dengan mudah memvalidasi data yang masuk, sehingga izin untuk ekspor impor dapat dikeluarkan dengan lebih cepat.

"Dengan pengeluaran perizinan yang dikemas dalam suatu digitalisasi dapat mempercepat proses pengeluaran perizinan. Dari awal masuk hingga keluar, pelaku pengusaha bisa melihat prosesnya," jelas Veri.

Adapun pada tahap 1 terdapat 5 komoditas yang sudah wajib menggunakan Neraca Komoditas, yaitu beras, gula, pergaraman, perikanan dan daging lembu. • **dot**

FIT HUB

MASIH JAMAN NGE-GYM MAHAL?

Rp 249 RIBU PER BULAN

FREE PROGRAMS

WEIGHT TRAINING - ZUMBA - FIT BOX - YOGA - DANCE

CONTACT US

0896 3968 3630

@fithub_id | fithub.id